

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) (STUDI MULTISITUS DI SDN BA'ENGAS 1 DAN SDN BUNAJIH 1 KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN)

UMI MU'MINATIN

Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana(S2)
Universitas Gresik

Pendidikan bukan merupakan tanggung jawab pendidik semata. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama sekolah, masyarakat dan keluarga. Untuk menciptakan generasi bangsa yang handal dibutuhkan sekolah yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas akan dapat terlaksana jika dilakukan pengelolaan dengan tepat. Dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi pendidikan melahirkan manajemen berbasis sekolah. Dengan mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah), adanya hubungan kemitraan yang kuat antar stakeholders dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah. Meningkatkan peran komite sekolah dalam MBS menjadi salah satu jalan pencapaian tujuan sekolah. Sehingga penulis berupaya mencari jawaban sejauhmana peran komite sekolah dalam penerapan MBS di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang mendalam tentang tema penelitian, memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa peran komite sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Bahkan yang lebih fatal adalah komite sekolah tidak memahami tugas, fungsi dan perannya sebagai komite sekolah di sebuah sekolah. Saran dari penulis adalah adanya sosialisasi tugas, fungsi dan terutama peran komite sekolah terhadap para komite sekolah dan anggotanya

Konteks Penelitian

Pendidikan bukan merupakan tanggung jawab pendidik semata. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama sekolah, masyarakat dan keluarga. Mengingat betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan maka sudah sepatutnya ada kerjasama yang baik agar ditemukan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi dunia pendidikan. Kesepahaman antara stakeholder yang ada dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Karena

dengan keselarasan dan kerjasama yang baik tentunya akan menciptakan dunia pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pendidikan di Indonesia pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut sekolah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Dengan menganut sistem sentralisasi tersebut pendidikan di Indonesia dinilai sangat kaku dan sentralistik (Wisudarini, 2021). Hal inilah yang menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan

kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Sri Minarti bahwa: “Faktor-faktor penyebab kurang berhasilnya upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input- oriented dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.” (Sri Minarti, 2011. h.48) Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang pendidikan. Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Setiawan, et al., 2021).

Kelahiran UU. No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakhiri era sentralisasi, kini telah lahir era desentralisasi dan otonomi daerah. Satuan pendidikan yang dalam era sentralisasi sering disebut sebagai sebuah institusi yang berada pada level paling bawah yang mengurus dunia pendidikan untuk anak-anak bangsa. Kini satuan pendidikan harus dapat bertanggung jawab untuk dapat mengurus dirinya sendiri, melalui mekanisme yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS). (Suparlan, 2013; Sudarwati, et al., 2021). Tujuan pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah diseluruh jenjang pendidikan. Maka dari itu, semua urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat diserahkan langsung kepada sekolah itu sendiri (Kaspiatun & Heriyanto, 2021; Purwantoro, et al., 2021). Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan

kegiatan manajemen sekolah yang efektif

Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka fokus penelitian yang penulis tetapkan adalah:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana mengatasi masalah yang muncul berkaitan dengan peran komite sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah berkaitan dengan peran komite sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu; kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. (www.tanotofoundation.org 23 Jan 2018)

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan padanan dari School-Based Management (SBM). Dalam hal ini, Bank Dunia (The World Bank) seperti yang dikutip oleh Suparlan menyebutkan bahwa:

*School-based management is the decentralization of levels of authority to the school level. Responsibility and decision-making over school operation is transferred to principals, teachers, parents, sometimes students, and other school community members. The school-levels actors, however, have to conform to, or operate, within a set of centrally determined policies*¹. (Suparlan, 2013, h.49)

(Dengan terjemahan MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas sekolah lainnya).

Menurut Sri Minarti di dalam buku Manajemen Sekolah, ia menjelaskan bahwa: “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipasi sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipasi lokal yang dimaksudkan adalah partisipasi kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekitar. (Sri Minarti, 2011, h.15).

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Bagi sekolah yang hendak menerapkan Manajemen berbasis sekolah harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi karakteristik dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Apabila telah memahami hal tersebut maka sekolah harus mampu menentukan karakteristik bagi sekolah tersebut. Dengan kata lain jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah maka sejumlah karakteristik MBS berikut perlu dimiliki. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah yang efektif (effective school). Jika MBS merupakan sebuah wadah atau kerangkanya maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah yang efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Sedangkan karakteristik MBS dilihat dari aspek input pendidikan adalah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas dan sumber daya yang tersedia, staf yang berkompeten dan berdedikasi yang tinggi, dan memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa) serta input manajemen. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses yaitu; proses pembelajaran yang

efektifitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan yang berubah, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan dan memiliki akuntabilitas. Karakteristik utama dan efektif dalam penerapan MBS di sekolah mencakup:

a. Otonomi Sekolah

Otonomi diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemandirian dalam program pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

b. Fleksibilitas

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan sekolah. Dengan keluwesan yang lebih besar yang diberikan kepada sekolah, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber dayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Kerjasama

MBS yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan menuntut adanya kerjasama antara staf yang ada dalam sekolah. Dampaknya akan menguntungkan anak didik, khususnya pentingnya team work dalam proses pembelajaran. d. Partisipatif Peningkatan partisipatif yang dimaksudkan adalah menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan, dan masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara itu, menurut Nurkholis yang dikutip Muhammad Syaifuddin dkk, MBS memiliki 8 karakter yaitu:

1. Sekolah memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan member arah kerja. Misi mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektifitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap warga sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik.

2. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi manajemen berbasis

sekolah. 3. Terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang

menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah.

4. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya.

5. Menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan disekolah.

6. Menekankan hubungan yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan.

7. Peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.

8. Efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multi segi. Penilaian terhadap efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok dan individu, yaitu indikator multi segi yaitu input, proses dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa. 43

Selain dari karakteristik manajemen berbasis sekolah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah yang berkaitan dengan hal hal tersebut di

bawah ini

(1) kewajiban

sekolah, terkait dengan kewajiban sekolah hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, kewajiban sekolah terhadap siswa, kewajiban sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan, kewajiban sekolah terhadap pemerintah dan masyarakat.

(2) kebijakan dan prioritas pemerintah, Sekolah pelaksana MBS harus tetap memperhatikan dan menjadikan kebijakan pemerintah sebagai acuan agar pelaksanaan MBS tetap berada pada koridor tujuan pendidikan nasional.

(3) peranan orang tua dan masyarakat, peran orang tua dan masyarakat menjadi faktor pendukung yang tidak akan bisa diabaikan oleh sekolah. karena tanpa adanya kerja sama yang baik antar stakeholder pendidik maka semua tidak akan berjalan dengan baik.

(4)

peranan profesionalisme dan manajerial serta pengembangan profesi.

a) Kewajiban Sekolah Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sekolah profesional. Oleh karena itu pelaksanaan perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.

b) Kebijakan dan Prioritas Pemerintah sebagai penanggung jawab

pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka (literacy and numeracy), efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Agar prioritas-prioritas pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktifitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut, terutama, ditunjang untuk menjamin bahwa hasil pendidikan (student outcome) terevaluasi dengan baik, kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, sekolah dioperasikan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.

c) Peranan Orang Tua dan Masyarakat MBS menuntut dukungan kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan system dan menghilangkan birokrasi yang tumpah tindih. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah. Melalui dewan sekolah (school council), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah

tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.

d) Peranan Profesionalisme dan Manajerial Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu profesional dan manajerial. Mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan. Kepala sekolah khususnya, perlu mempelajari dengan teliti, baik kebijakan dan prioritas pemerintah maupun prioritas sekolah sendiri. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus: 1) Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah; 2) Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran; 3) Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian masa depan berdasarkan situasi sekarang; 4) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di sekolah; dan 5) Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan. Pemahaman

terhadap sifat profesional dan manajerial tersebut sangat penting agar peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan serta supervisi serta monitoring yang direncanakan sekolah betul-betul untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.

MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan adanya karakteristik tersebut, merupakan ciri khas yang membedakan dari sekolah yang lain. MBS memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Adanya otonomi yang luas kepada sekolah. 2) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi. 3) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 4) Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional. (I Gusti Ketut Arya Sunu, 2014, h.11)

B. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Dalam Permendiknas nomor: 044/U/2002 ditegaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun luar sekolah. (Hasbullah, 2006:90).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Permendikbud nomor 75 tahun 2016) telah diterbitkan. Dalam peraturan ini, komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli pendidikan. Fungsi komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Pekerjaan pelayanan pendidikan bermutu perlu dukungan komite sekolah bermutu. Dalam tulisan ini, komite sekolah dikatakan bermutu jika dipilih dan melaksanakan

funksinya sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya komite sekolah bermutu.

Sebelum diterapkannya Permendikbud nomor 75 tahun 2016, komite sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Banyak permasalahan terkait fungsi komite sekolah. Masih adanya unsur guru sebagai anggota komite sekolah memungkinkan terjadinya *conflict of interest* dari guru, tenaga kependidikan, penyelenggara sekolah, dan *stakeholder* lainnya. Peraturan ini juga belum mencantumkan nomenklatur yang tegas membedakan antara pungutan, sumbangan, dan bantuan. Hal ini membuka celah adanya pungutan berbalut sumbangan atau bantuan.

Menurut Djarm'an Satori (2001), sebagai konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah, maka perlu di kembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum di mana representasi para stakeholder Sekolah terwakili secara proporsional. Dalam berbagai dokumen yang ada dan konsensus yang telah muncul dalam berbagai forum, wadah ini di beri nama komite Sekolah. Dalam pengertian lain, Djarm'an Satori menyebutkan bahwa komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono, 2008:258).

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan : pertama, Armansyah (077003032), dalam tesis berjudul Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di kota Binjai, tahun 2009. Universitas Sumatra Utara, Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1) mengetahui bagaimana sebenarnya peran yang dilakukan Komite Sekolah dalam membuat perencanaan pendidikan pada SMA Negeri setelah terbentuknya Komite Sekolah, 2) mengetahui peran Komite Sekolah dalam peningkatan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri di kota Binjai, sebagai badan pertimbangan, badan penghubung, badan pengontrol dan *mediator*. Metodologi dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis domain, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Komite Sekolah pada SMA Negeri di kota Binjai pada prinsipnya melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal dukungan dana, komite Sekolah belum berhasil mendapatkan dana dari masyarakat sekitar seperti dari dunia usaha/ dunia industri maupun dari masyarakat yang peduli pendidikan dan masih terbatas dana dari orang tua siswa melalui iuran komite sekolah. Dalam pelaksanaan perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan dan pengawasan yang lebih utama, sedang peran lainnya sebagai pendukung dan *mediator*, belum sepenuhnya terlaksana. Pemberdayaan yang dilakukan baru pada pemahaman tentang komite Sekolah.

Kedua, Samuri. 630207009. Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Standar Nasional (Studi Kasus di SDN Pandean 1 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), Pembimbing I: Dr. Zaini Rohmad, MS. Pembimbing II: Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si. Tesis: Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011. Penelitian ini bertujuan (a) mendiskripsikan pemahaman peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak, (b) mendiskripsikan peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas Pendidikan

di SDN Pandean 1 Ngemplak, (c) mendiskripsikan dampak peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan teknik

snowball sampling. Analisa data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan: (a) Pemahaman dan pelaksanaan peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas sekolah standar nasional adalah sama dengan pemahaman dan Sekolah dalam pengembangan mutu sekolah standar nasional dengan memberikan pertimbangan penyusunan RKS/RKAS, memberikan dukungan dan pertimbangan dalam penyusunan KTSP maupun visi misi, tujuan dan kebijakan serta kegiatan sekolah, melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dana BOS dan hasil lulusan, memberikan pertimbangan dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler dan penerimaan peserta didik baru. (c) Peran Komite Sekolah berdampak terhadap mutu hasil belajar siswa dan manajemen pengelolaan terutama perilaku kedisiplinan siswa, kebersihan dan keindahan kelas maupun lingkungan sekolah, lulusan yang diterima di sekolah negeri, nilai rata-rata nilai UASBN mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA mencapai 8,3, kepercayaan masyarakat bertambah dengan mendaftarkan anak sekolah di SDN Pandan 1.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat mendapatkan

gambaran yang mendalam tentang tema penelitian, memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data (Sugiyono, 2011: 295-296).

Metode kualitatif yang dipilih karena permasalahan tema penelitian yang sangat kompleks serta dinamis sehingga tidak mungkin data pada situasi yang dinamis tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data deskripsi mengenai kegiatan atau perilaku subyek yang diteliti, baik persepsinya maupun pendapatnya serta aspek-aspek lain yang relevan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagaimana Sutarna (2016: 32) sampaikan bahwa penelitian kualitatif didasari oleh konsep konstruktivisme karena realita bersifat jamak, menyeluruh, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Realita bersifat terbuka, kontekstual, secara sosial meliputi persepsi dan pandangan-pandangan individu dan kolektif, serta manusia sebagai instrumennya.

Di antara karakteristik penelitian kualitatif adalah pada latar alamiah atau pada konteks pada suatu keutuhan, laporan penelitian bersifat deskriptif yang berupa kata-kata bukan angka-angka, serta lebih mementingkan proses dari pada hasil (Moleong, 2001: 4-7), maka dalam penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang proses implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Baengas 2 dan SD Negeri Bunajih 2 di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

B. Kehadiran Peneliti

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019. Peneliti hadir ke sekolah setiap hari Senin di SDN Baengas 2 dan hari Rabu di SDN Bunajih 2 untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data yang autentik. Dan tempat penelitian adalah tempat terdekat dengan lokasi penulis bertugas saat ini .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di SD Negeri Baengas 2 yang ada di Dusun Tambak Agung Desa Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dan SDN Bunajih 2 yang terletak di dusun Nong Malang Desa Bunajih Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan .Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa kecamatan Labang memiliki letak yang cukup strategis di wilayah Bangkalan paling dekat dengan akses Suramadu sehingga menjadi cerminan pada jenjang pendidikan dasar di Bangkalan dengan prestasi-prestasi yang diraihinya pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan pertimbangan ini peneliti ingin memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan utamanya bagi lembaga pendidikan di Bangkalan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah .

Yang menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah lokasi penelitian dekat dengan tempat penulis bertugas saat ini, sehingga mempersingkat jarak tempuh dari lokasi penulis berdomisili ke tempat penelitian yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari sekolah penulis.

D. Sumber Data

Subjek penelitian menurut Idrus (2009: 91) adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Oleh kalangan peneliti kualitatif, subjek penelitian disebut juga dengan istilah

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan perihal penelitiannya.

Berbeda dengan pendapat Moloeng (2001: 90) bahwa informan adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga ia harus memiliki banyak pengetahuan tentang latar penelitian, karena harus memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan pada latar penelitian.

Dari pengertian tersebut di atas, maka peneliti memperoleh data hasil penelitian ini dari Kepala Sekolah, guru, anggota komite sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang merupakan sumber data penelitian dan arsip-arsip administrasi yang dimiliki oleh sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011: 310). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dipilih peneliti adalah observasi partisipatif yang bersifat moderat, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Peneliti dalam hal ini tidak sepenuhnya mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh sumber data, tetapi

terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar (Sugiyono, 2011: 310-312).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti observasi dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, proses pembelajaran, sarpras dan kurikulum yang diterapkan.

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

Wilayah kabupaten Bangkalan yang memiliki luas 1260,14 km² dan jumlah penduduk 945,425 jiwa. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan adalah kecamatan Labang tempat penulis melakukan kegiatan penelitian. Menurut data dinas pendidikan, kecamatan Labang memiliki 22 SDN, 1 MIN, 2 SDI, 2 SMPN, 4 SMP/MTs Swasta, 1 SMKN, 3 SMA/MA Swasta. Adapun sekolah tempat penulis melaksanakan penelitian ada di dua desa yaitu desa Ba'engas dan Desa Bunajih. Di desa Ba'engas terdapat 2 sekolah dasar negeri yaitu SDN Ba'engas 1 (tempat penulis melaksanakan tugas kepala sekolah), SDN Ba'engas 2 (tempat penulis melaksanakan penelitian) sedangkan di desa Bunajih terdapat 2 sekolah dasar yaitu SDN Bunajih 2 (tempat penulis melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah) dan SDN Bunajih 2 (tempat penulis melaksanakan penelitian).

PEMBAHASAN

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah.

Itulah sebabnya maka paradigma MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang di ambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama (Hasbullah,2006:91-93). Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang di sebut sebagai total quality management, melalui suatu mekanisme yang di kenal dengan konsepsi total football dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan,yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat (Hamzah,2007:93).

Sementara itu, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. Kebijakan dan program pendidikan. b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). c. Kriteria kinerja satuan pendidikan. d. Kriteria tenaga pendidikan. e. Kriteria fasilitas pendidikan. f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik tetapi masih membutuhkan banyak pembenahan.
2. Peran serta fungsi komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 masih belum maksimal. Keterlibatan komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah masih berada jauh dari harapan pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 75 tahun 2016.
3. Kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam melibatkan komite di setiap kebijakan adalah kemampuan komite sekolah yang belum memahami akan tugas dan fungsinya. Mengingat lokasi sekolah penelitian ada di wilayah pedesaan bisa menjadi suatu penyebab tidak berfungsinya komite sekolah sesuai tugas dan perannya, karena dapat dikatakan sebagian besar anggota komite tidak memahami tugas, fungsi dan perannya sebagai anggota komite sekolah.
4. Kegiatan yang paling sering dilakukan oleh komite sekolah adalah menghadiri undangan sekolah ketika ada rapat dan sekedar menandatangani apa yang telah disusun sekolah tanpa membaca terlebih dahulu. Bahkan komite sekolah hanya sekedar tulisan yang terpampang pada dinding tembok sebagai bagian dari struktur organisasi komite sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan agar pihak sekolah pro aktif untuk:

1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan menteri pendidikan nasional nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

2. Melakukan pemilihan ulang anggota komite sekolah sehingga manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana dengan baik demi meningkatkan mutu pendidikan sehingga tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah di SDN Ba'engas 2 dan SDN Bunajih 2 dapat tercapai..

3. Melakukan komunikasi yang intens antara pihak sekolah dan komite sekolah dalam menentukan arah kebijakan sekolah.

Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh sekolah dan masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta fungsi, tugas dan peran komite sekolah berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2005. *Komite Sekolah dan Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Pasal 1 ayat (2) tentang Fungsi Komite*. Hendarmoko dan Samsuddin. 2008. *Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah*
- Muhi, Hanapiah. 2008. *Jurnal Lingkaran Mutu* Vol. 1 Desember 2008.. Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar* edisi I, 2011.
- David Williams dalam Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* PT Remaja Rosdakarya, Bandung Pendidikan, Ircisod, Yogyakarta, 2012. E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, cet.XIV, 2012.
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, cet.ke XII, 2013.
- Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada sekolah*, Pustaka Rizqi Putra, cet.II, , Semarang, 2013.
- Hanafiah, M. Jusuf, dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 1994.
- Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kaspiatun, S., & Heriyanto, A. (2021). UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN GURU DI KELAS DENGAN MENGISI JURNAL MENGAJAR ONLINE MELALUI WEBSITE DI MTs SA MIFTAHUL HIKMAH TAHUN 2019. *Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan*, 11(1).
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Maruf, N., Desembrianita, E., & Husain, D. H. (2021). Identifying ESP Course Materials for Students of Magister Management: A Needs Analysis. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5773-5788
- Nanamg Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya 2012
- Nur Zazin, *Gerakan menata mutu Pendidikan , Teori & Aplikasi*, Ar Ruzz Cet.II, Yogyakarta, 2011.
- Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Purwantoro, A., Asari, S., & Maruf, N. (2021). The effectiveness of E-Learning madrasah in English teaching and learning. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5234-5244.
- Rauf A Hatu, *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat* 1995.

Dedi Mulyasana, Pendidikan *Bermutu dan Berdaya Saing*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu*.

Wisudarini, Y. A. (2021). MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS SOSIAL BUDAYA DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan*, 10(2).